

## EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BAGIAN INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa BERBASIS AGROMARINE

Anjas Fahmi Mustafa<sup>1</sup>, Papia J.C Franklin<sup>2</sup>& Cynthia E.V. Wuisang<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi

<sup>2</sup>& <sup>3</sup>Staff Pengajar Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

E-mail: [anjasfahmii21@gmail.com](mailto:anjasfahmii21@gmail.com)

### Abstrak

Persiapan pembangunan dari segi fisik infrastruktur prioritas dapat melalui identifikasi potensi dan serta perencanaan induk dalam mendukung pengembangan Kota Tidore Kepulauan sebagai kota jasa berbasis agromarine. Dengan basis Agromarine yang merupakan percepatan dan mengoptimalkan pembangunan dan percepatan pemanfaatan sumber daya potensial dan unggulan di darat maupun di laut yang meliputi sektor perikanan, pariwisata, pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur menjadi faktor utama untuk mendukung terwujudnya Kota Tidore Kepulauan sebagai kota jasa berbasis agromarine, karena pola agromarine di tekankan harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kota Tidore Kepulauan menjadi kota jasa berbasis agromarine dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi 5 bidang pendukung di program infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif dan evaluatif dengan mengidentifikasi data yang sudah ada di 5 bidang pada program infrastruktur, dan mengevaluasi menggunakan parameter yang telah di tentukan. Hasil rangkaian analisis yang di lakukan, di peroleh bahwa 5 bidang khususnya program infrastruktur tahun 2016-2018 dari 5 bidang belum semua mencapai target (100%) di antaranya di bidang Pertanian 2016, 33% 2017, 33%, 2018, 66%, di bidang perikanan 2016, 50%. 2017, 50%, 2018 50%, di bidang kelautan 2016, 50%, 2017, 50%, 2018, 50%, di bidang pariwisata 2016, 66%, 2017, 33%, 2018, 66%, di bidang pekerjaan umum 2016, 42%, 2017, 50%, 2018, 65%. 5 bidang pada program Infrastruktur banyak yang belum sesuai dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

**Kata Kunci:** *Agromarine, Program, Infrastruktur, Kota Tidore Kepulauan.*

### PENDAHULUAN

Sejak Tidore bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950 setelah meleburkan semua wilayah kekuasaannya termasuk Papua untuk menjadi NKRI. Maka setelah melalui perundingan cukup panjang dari seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya, terbentuklah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Mei 2003.

Persiapan pembangunan dari segi fisik infrastruktur prioritas dapat melalui identifikasi potensi dan serta perencanaan induk dalam mendukung pengembangan Kota Tidore Kepulauan sebagai kota jasa berbasis agromarine. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan untuk membangun interkoneksi dalam daerah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini selain merupakan program Pemerintah Pusat, juga

didasari bahwa infrastruktur dasar dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan belum seluruhnya dalam kondisi baik, termasuk infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Selain belum seluruh jalan masih masuk dalam kategori kondisi baik, utamanya jalan di Kecamatan Oba Selatan, serta jalan menuju ke lokasi wisata seperti Taman Nasional Aketajawe. Selain itu, perlu dilakukan pembukaan jalan-jalan baru sebagai strategi penyebaran pemukiman bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga harus didasari perencanaan secara terpadu, efektif dan efisien termasuk dalam mendukung aktivitas masyarakat (perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, perindustrian), seperti jalan tani, irigasi, embung, air bersih, pelabuhan perikanan, pasar, terminal, gedung pertemuan yang representatif

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi program infrastruktur di semua bidang untuk

mendukung Kota Tidore sebagai Kota jasa berbasis agromarine.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Analisis Kebijakan.

- a. Perencanaan.  
Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang meliputi infrastruktur transportasi, jalan dan jembatan, air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perkotaan, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah didasarkan atas gagasan bahwa pembangunan tidak saja bermanfaat untuk golongan atau wilayah tertentu saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
- b. Implementasi.  
Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang di lakukan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sudah mencapai di tahap baik tetapi ada program yang tidak mencapai Target yang sudah di tentukan pemerintah.
- c. Evaluasi.  
Yang harus di evaluasi adalah program yang tidak mencapai target pada tiap tahunnya, khususnya di bidang Infrastruktur.

#### Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Winarno (2014) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan. Oleh karenanya, penilaian atau evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan. Menurut Arikunto (2013) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

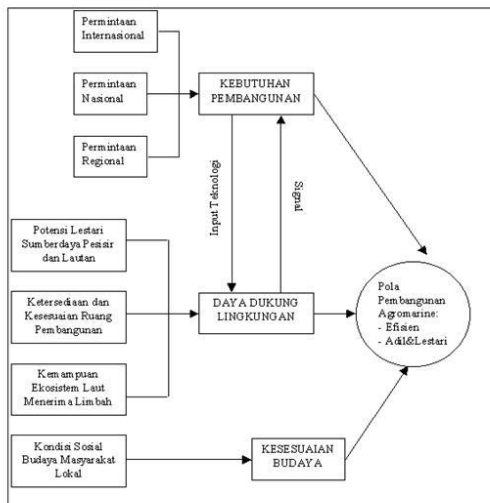
#### Definisi Agromarine

Dalam pembangunan ekosistem kepulauan, secara garis besar terdapat tiga pilihan pola atau model pembangunan yang dapat diterapkan untuk ekosistem pulau kecil. Pertama, menjadikan pulau sebagai kawasan konservasi, sehingga dampak negatif penting akibat kegiatan manusia tidak ada atau sangat kecil. Ke dua, pembangunan pulau secara optimal dan berkelanjutan, seperti untuk pertanian dan perikanan yang semi-intensif. Ke tiga, pola pembangunan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan perubahan radikal pada ekosistem pulau, seperti pertambangan skala besar, tempat uji coba nuklir, dan industri pariwisata skala besar. Diantara ke dua pola ekstrim, yaitu pola pembangunan tipe pertama dan ke tiga, terdapat pola pembangunan yang berkelanjutan, yang terdiri dari berbagai kegiatan pembangunan seperti pertanian terkendali, penangkapan ikan baik di perairan pantai maupun laut lepas, budidaya tambak dan budidaya laut (marine culture), pariwisata, industri rumah tangga/industri kecil, dan sektor jasa (Hein, 1990).

Pembangunan wilayah dengan pola agromarine, telah diintroduksi sejak tahun 1992 oleh Departemen Transmigrasi dan PPH. Pola Agromarine adalah pola pendayagunaan alam yang mengutamakan sumberdaya hayati laut agar diperoleh manfaat optimal melalui prinsip pengembangan agribisnis. Konsep ini meliputi pengembangan industri sumberdaya perikanan sebagai sektor sentral yang ditunjang oleh pemanfaatan sumberdaya hayati dan nirhayati di sekitarnya, dengan berdasarkan pada prinsip kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup (PPP, Dep. Trans. dan PPH; LPWP-UNDIP, 1995).

Agar pembangunan suatu pulau kecil dengan pola agromarine dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya penduduk asli pulau tersebut, maka pola pembangunan agromarine hendaknya didasarkan pada tiga prinsip dasar utama, yaitu: (1) kesesuaian dan daya dukung

lingkungan; (2) pendekatan agrobisnis; dan (3) pendekatan kemitraan. Melalui penerapan tiga prinsip ini, pembangunan pulau kecil dengan pola agromarine akan berlangsung secara berkelanjutan, baik secara ekologis (*ecological sustainability*), ekonomis (*economic sustainability*), dan sosial budaya (*socio-cultural sustainability*), (Dahuri, 1998). Secara skematis perumusan model pembangunan wilayah kepulauan dengan pola agromarine disajikan pada Gambar di bawah:



Gambar 1 Perumusan model pola agromarine (perumusan model pembangunan wilayah kepulauan dengan pola agromarine)  
Sumber: Dahuri 1998)

### Kebijakan Pemerintah untuk mendukung Kota Tidore Sebagai Kota jasa berbasis agromarine (sektor pertanian dan perikanan)

Pengembangan industri sumberdaya perikanan sebagai sektor sentral yang ditunjang oleh pemanfaatan sumberdaya hayati dan nirhayati di sekitarnya, dengan berdasarkan pada prinsip kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Berikut ini adalah kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di sektor Pertanian dan Perikanan:

Tabel 1 Kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di bidang Perikanan dan Kelautan

Strategi	Arah kebijakan
1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap

budidaya	2. Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya
----------	---

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2020

Tabel 2 Kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di bidang Pertanian

Strategi	Arah kebijakan
1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi dan pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan
	2. Menciptakan daya saing dan Menjamin pemasaran hasil produksi pertanian.

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2020

### Pengertian Pariwisata dan Kebijakan Pemerintah untuk mendukung Kota Tidore Sebagai Kota jasa berbasis agromarine (sektor pariwisata)

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia.

Tabel 3. Kebijakan Pemerintah kota Tidore Kepulauan di bidang Pariwisata.

Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan destinasi wisata	Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata secara profesional dan berdaya saing

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2020

### Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik, yang bersifat fundamental di tujuan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat secara umum, Infrastruktur adalah istilah yang berhubungan maknanya dengan struktur di bawah struktural (*structure beneath a structureal*)

Tabel 4 Kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di bidang Pekerjaan Umum.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan infrastruktur darat dan laut yang mendukung perekonomian daerah	Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah	1. Meningkatkan kondisi jalan yang menghambat konektivitas dalam wilayah
			2. Membangun, merehabilitasi dan mengelola irigasi dan embung.
			3. Menuntaskan sarana dan prasarana pasar, utamanya pasar Sarimalaha;
			4. Meningkatkan dan mengelola sarana dan prasarana pelabuhan termasuk pelabuhan perikanan
			5. Membangun dan meningkatkan kondisi drainase untuk mengatasi titik banjir dan genangan air.
			6. Membangun gedung/hotel yang mendukung perekonomian dan aktivitas pemerintahan
			7. Mengembangkan ruang terbuka hijau, utamanya RTH Tugulufa
			8. Melakukan kegiatan pembangunan sesuai tata ruang, daya dukung dan daya tampung

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2020

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif dan evaluatif dengan mengidentifikasi data yang sudah ada di 5 bidang pada program infrastruktur, dan mengevaluasi menggunakan parameter yang sudah ditentukan

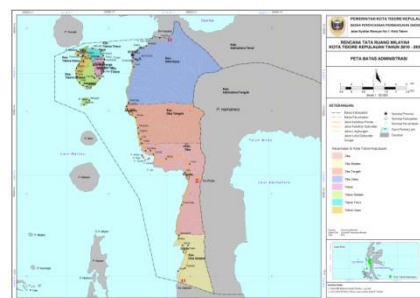
### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemekaran wilayah yang diresmikan pada tanggal 31 Mei 2003. Secara geografis, letak wilayah Kota Tidore Kepulauan berada pada batas astronomis 0°-20° Lintang Utara dan pada posisi 127°- 127,45° Bagian Timur. Kota Tidore Kepulauan memiliki total luas wilayah

13.862,86 Km<sup>2</sup> dengan daratan 9.116,36 Km<sup>2</sup> dan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara Berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera barat.
- Sebelah timur Berbatasan dengan Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
- Sebelah selatan Berbatasan dengan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan Kecamatan pulau Moti Kota ternate.
- Sebelah barat Berbatasan dengan Laut Maluku. Secara administratif, kota Tidore Kepulauan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 72 desa/kelurahan seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Kecamatan Tidore; Jumlah desa/kelurahan 11 dengan ibukota Gamtufkange, dan luas daerah 212,15 Km<sup>2</sup>.
2. Kecamatan Tidore Selatan; Jumlah desa/kelurahan 8 dengan ibukota Gurabati, dan luas daerah 249,32 Km<sup>2</sup>.
3. Kecamatan Tidore Utara; Jumlah desa/kelurahan 12 dengan ibukota Rum, dan luas daerah 221,33 Km<sup>2</sup>
4. Kecamatan Tidore Timur; Jumlah desa/kelurahan 4, dengan ibukota Tosa dan luas daerah 199,92 Km<sup>2</sup>.
5. Kecamatan Oba; jumlah desa/kelurahan 9 dengan ibukota Payahe, dan luas daerah 2.373,63 Km<sup>2</sup>.
6. Kecamatan Oba Selatan; Jumlah desa/kelurahan 7, dengan ibukota Lifofa, dan luas daerah 2.210,92 Km<sup>2</sup>.
7. Kecamatan Oba Utara; jumlah desa/kelurahan 9 dengan ibukota Sofifi, dan luas daerah 1.155,91 Km<sup>2</sup>.
8. Kecamatan Oba Tengah; jumlah desa/kelurahan 12, dengan ibukota Akelamo dan luas daerah 2.493,17 Km<sup>2</sup>.




Gambar 2 Peta Administrative Kota Tidore Kepulauan

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Identifikasi Masalah 5 Bidang (Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pariwisata, dan Perumahan dan Permukiman) Khususnya Infrastruktur dari tahun 2016-2018**

Pada bagian ini akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai kebijakan atau program yang telah di gagas oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan program yang di gagas oleh Pemerintah atau belum. Di muat dalam bentuk tabel serta penjelasan atau deskripsi sebagai berikut:

**Tabel 5 Identifikasi masalah di Bidang Pertanian Khususnya program Infrastruktur Tahun 2016**

NO.	Lokasi	Arah Kebijakan	Deskripsi	Kondisi di Lapangan.
1	Kota Tidore Kepulauan	Sarana Prasarana Pertanian dan Perkebunan	Pembuatan Irigasi pada Desa Kahoho Tayavi Kec. Oba dengan panjang 2512 M.	

(sumber data dinas pertanian 2016)

**Tabel 6. Identifikasi masalah di Bidang Perikanan Khususnya program Infrastruktur Tahun 2016**


NO.	Lokasi	Arah Kebijakan.	Deskripsi	Kondisi di Lapangan.
1	Peta sarana Perikanan Kota Tidore Kepulauan	Sarana Prasarana Perikanan tangkap	Pelabuhan Perikanan tangkap di Kelurahan Goto tahun 2016 terlihat sangat kecil.	

(sumber data perikanan 2016)

**Tabel 7. Identifikasi masalah di Bidang Kelautan Khususnya program Infrastruktur Tahun 2016**




NO.	Lokasi	Arah Kebijakan	Deskripsi.	Kondisi di Lapangan
1	Peta sarana Perikanan Kota Tidore Kepulauan	Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya.	Sarana Pelabuhan Perikanan yang ada di Pasar Goto Kota Tidore Kepulauan. Yang tidak mempunyai lemari penyimpanan ikan.	




**Tabel 8. Identifikasi masalah di Bidang Pariwisata Khususnya program Infrastruktur Tahun 2016**

NO.	Lokasi	Arah Kebijakan.	Deskripsi.	Kondisi dan Permasalahan
1	Peta sebaran objek wisata	Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan destinasi wisata.	Destinasi Wisata di pantai ake saba yang tidak ada WC dan Kamar mandi.	

(sumber Dinas Pariwisata 2016)

**Tabel 9. Identifikasi masalah di Bidang Perumahan dan Permukiman Khususnya Program Infrastruktur Tahun 2016**



NO.	LOKASI	Bidang Yang menjalankan Kebijakan.	Indikasi Program	Deskripsi	Kondisi di Lapangan.
1	Peta Drainase Peta sebaran pasar	Perumahan dan Permukiman	Drainase dan Sarana Prasarana Pasar Sarimalaha, Gedung dan Hotel.	(1) Renovasi Drainase pada tahun 2016 di Kelurahan Ome.	 (Renovasi drainase di kelurahan Ome)
				(2) Renovasi Pasar sarimalaha yang terbakar pada tahun 2015.	 Renovasi pasar sarimalaha
2		Bina Marga	Jalan, Jembatan, Dan Gorong-gorong	(1) Pembuatan Jalan Lada Ake-Jaya.	 (pembuatan jalan Lada ake jaya)

			(2) Jembatan yang rusak di Kelurahan Payabe, dan belum di perbaiki oleh Pemerintah.	 (kondisi jembatan payabe)
3	Tata Ruang	Pelabuhan, Peta buhan	(1), Pelabuhan Speed Boat Rum yang atapnya ambruk di teryang angin.	 (pelabuhan Rum Tidore).
			(2) RTH Tuguluha yang di salah gamban.	

Tabel 10. Identifikasi masalah di Bidang Pertanian Khususnya program Infrastruktur Tahun 2017

4.3.6 Identifikasi masalah di bagian Pertanian Tahun 2017.

Tabel 4.7 Identifikasi masalah di bagian Pertanian Khususnya Infrastruktur Tahun 2017.

NO.	Lokasi	Arah Kebijakan	Deskripsi	Kondisi di Lapangan.
1	Kota Tidore Kepulauan	Sarana Prasarana Pertanian dan Perkebunan.	(1) Salah Satu Jalan Pertanian di kecamatan Oba yang belum di perbaiki.	 (desa tayavi)
			(2) Pembuatan Irigasi pada Desa Keili, Kec. Oba dengan panjang 465 MF.	 (Desa Keili)

(sumber data dinas pertanian 2017)

Tabel 11. Identifikasi masalah di Bidang Perikanan Khususnya program Infrastruktur Tahun 2017

4.3.7 Identifikasi masalah di bagian Perikanan Tahun 2017.

Tabel 4.8 Identifikasi masalah di bagian Perikanan Khususnya Infrastruktur Tahun 2017.

NO.	Lokasi	Arah Kebijakan.	Deskripsi	Kondisi di Lapangan.
1	Peta sarana Perikanan Kota Tidore Kepulauan.	Sarana Prasarana Perikanan tangkap	Pelabuhan Perikanan tangkap di Kelurahan payabe tahun 2017 terlihat sangat kecil.	

(sumber data perikanan 2017)

Tabel 12. Identifikasi masalah di Bidang Kelautan Khususnya program Infrastruktur Tahun 2017

4.3.8 Identifikasi masalah di bagian Kelautan Tahun 2017.

Tabel 4.8 Identifikasi masalah di bagian Kelautan Tahun 2017.

NO.	Lokasi	Arah Kebijakan	Deskripsi.	Kondisi di Lapangan
1	Peta sarana Perikanan Kota Tidore Kepulauan.	Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya.	Sarana Pelabuhan Perikanan yang ada di Pasar payabe Kota Tidore Kepulauan. Yang tidak mempunyai lemari penyimpanan ikan.	

(sumber dinas Perikanan 2017)

Tabel 13. Identifikasi masalah di Bidang Pariwisata Khususnya program Infrastruktur Tahun 2017

4.3.9 Identifikasi masalah di bagian Pariwisata Tahun 2017.

Tabel 4.10 Identifikasi masalah di bagian Pariwisata Khususnya Infrastruktur Tahun 2017.




NO.	Lokasi	Arah Kebijakan.	Deskripsi.	Kondisi dan Permasalahan
1	Peta sebaran obyek wisata	Meningkatkan sarana prasarana dan pengproteksi destinasi wisata.	Destinasi Wisata di pantai Cobo yang tidak ada saran prasarana seperti WC dan Kamar mandi.	




(sumber Dinas Pariwisata 2017)

Tabel 14. Identifikasi masalah di Bidang Perumahan dan Permukiman Khususnya program Infrastruktur Tahun 2017

4.3.10 Identifikasi masalah di bagian Infrastruktur Tahun 2017.

Tabel 4.11 Identifikasi masalah di bagian Infrastruktur Tahun 2016.

NO.	LOKASI	Bidang Yang menjalankan Kebijakan.	Indikasi Program	Deskripsi	Kondisi di Lapangan.
1	Peta Drainase  Peta sebaran pasar	Perumahan dan Permukiman.	Drainase dan Sarana Prasarana Pasar Sarimalaha, Gedung dan Hotel.	(1) Renovasi Drainase pada tahun 2017 di Kelurahan Bobo.	 (Renovasi drainase di kelurahan Bobo)
				(2) Renovasi gedung B Pasar sarimalaha.	 (Renovasi gedung B pasar sarimalaha)
2		Bina Marga	Jalan, Jembatan Dan Gorong gorong	(1) Pembuatan Jalan Terminal Soffi.	 (pembuatan jalan Terminal soffi 2017)



				(2) Jembatan yang rusak di Kelurahan Marebu, dan belum di perbaiki oleh Pemerintah.	
3		Tata Ruang	Pelabuhan, Peta buhan perikanan, RTH Tuguluha	(1), Pelabuhan Speed Boat Soffi yang tidak memiliki ruang tunggu.	
				(2) RTH Tuguluha yang di salah gunakan menjadi kios jajanan.	

(sumber Dinas Bapelitbang 2017)

Tabel 15 Identifikasi masalah di Bidang Pertanian Khususnya program Infrastruktur Tahun 2018

4.3.11 Identifikasi masalah di bagian Pertanian Tahun 2018.

Tabel 4.12 Identifikasi masalah di bagian Pertanian Khususnya Infrastruktur Tahun 2017.

NO.	Lokasi	Arah Kebijakan	Deskripsi	Kondisi di Lapangan.
1	Kota Tidore Kepulauan	Sarana Prasarana Pertanian dan Perkebunan.	(1) Pembuatan Embung di Kelurahan Gurabunga.  (2) Pembuatan Irigasi pada Desa Kosa, Kec. Oba dengan panjang 625 M <sup>2</sup> .	 (Embung Kelurahan Gurabunga)   (Desa Kosa)

(sumber data dinas pertanian 2018)

Tabel 16. Identifikasi masalah di Bidang Perikanan Khususnya program Infrastruktur Tahun 2018

4.3.12 Identifikasi masalah di bagian Perikanan Tahun 2018.

Tabel 4.13 Identifikasi masalah di bagian Perikanan Khususnya Infrastruktur Tahun 2018.


NO.	Lokasi	Arah Kebijakan	Deskripsi	Kondisi di Lapangan.
1	Peta sarana Perikanan Kota Tidore Kepulauan	Sarana Prasarana Perikanan tangkap	Pelabuhan Perikanan tangkap di Kelurahan Tomalou tahun 2018 terlihat sangat kecil.	 (Pelabuhan Perikanan Tomalou)

(sumber data perikanan 2018)

Tabel 17. Identifikasi masalah di Bidang Kelautan Khususnya program Infrastruktur Tahun 2018

4.3.13 Identifikasi masalah di bagian Kelautan Tahun 2018.

Tabel 4.14 Identifikasi masalah di bagian Kelautan Tahun 2018.

NO.	Lokasi	Arah Kebijakan	Deskripsi.	Kondisi di Lapangan
1	Peta sarana Perikanan Kota Tidore Kepulauan	Meningkatkan sarana dan prasarana budaya.	Sarana Pelabuhan Perikanan yang ada di Kelurahan Tomalou, Kota Tidore Kepulauan, Yang tidak mempunyai lemari penyimpanan ikan.	 (Pelabuhan Perikanan Tomalou)

(sumber Dinas Perikanan 2018)

Tabel 18. Identifikasi masalah di Bidang Pariwisata Khususnya program Infrastruktur Tahun 2018

4.3.14 Identifikasi masalah di bagian Pariwisata Tahun 2018.

Tabel 4.15 Identifikasi masalah di bagian Pariwisata Khususnya Infrastruktur Tahun 2018.







NO.	Lokasi	Arah Kebijakan.	Deskripsi.	Kondisi dan Permasalahan
1	Peta sebaran objek wisata	Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan destinasi wisata.	Pengelolaan Destinasi wisata di Pantai Matara khususnya sarana prasarana untuk event nasional Matara Jaga Ngar.	 (Wisata Pulau Matara)

(Sumber Dinas Pariwisata 2018)

Tabel 19 Identifikasi masalah di Bidang Perumahan dan permukiman program Infrastruktur Tahun 2018

4.3.15 Identifikasi masalah di bagian Infrastruktur Tahun 2017.

Tabel 4.16 Identifikasi masalah di bagian Infrastruktur Tahun 2018.

NO.	LOKASI	Bidang Yang menajalankan Kebijakan.	Indikasi Program	Deskript	Kondisi di Lapangan.
1	Peta Drainase  Peta sebaran pasar	Perumahan dan Permukiman.	Drainase dan Sarana Prasarana Pasar Sarimilaha, Goding dan Hotel.	(1). Renovasi Drainase pada tahun 2018 di Kelurahan Cobo.  (2) Renovasi gedung A Pasar Sarimilaha Selesai.	 (Renovasi drainase di kelurahan Cobo)  
2	Peta Jaringan jalan	Bina Marga	Jalan, Jembatan, Dan Gorong-gorong	(1) Pembuatan Jalan Tusebo. Jalan ini juga akses baru, penghubung antara desa tusebo dan akelamo. Yang tahun sebelumnya tidak memiliki akses penghubung.  (2) Jembatan yang ambruk di desa akelamo, akibat bencana alam.	 (pembuatan jalan Terminal Tusebo 2018)  
3	Peta Jaringan Transportasi	Tata Ruang.	Pelabuhan, Peta tohan perikanan, RTH Tuguluha	(1), Pelabuhan Pelni Trikora Tidore yang lahan parkir di gunakan sebagai penyimpanan peti kemas.  (2) RTH Tuguluha yang sudah di benahi tetapi tidak memiliki sarana prasarana seperti Kamar Mandi dan wc.	 (pelabuhan Trikora tidore)   (RTH Tuguluha)

(Sumber Dinas Bapelitbang 2018)

### Evaluasi Kebijakan pemerintah di Semua Bagian (Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata,) khususnya Infrastruktur dari tahun 2016-2018

Pada bagian ini akan membahas tentang evaluasi program-program yang di gagas oleh pemerintah. Di muat dalam bentuk tabel serta penjelasan atau deskripsi sebagai berikut:

Tabel 20. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanian Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2016

4.4.1 Evaluasi Kebijakan Pemerintah dibidang Pertanian Tahun 2016

Pada tabel 4.17 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang pertanian pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.17 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pertanian Khususnya Infrastruktur Tahun 2016.

NO	Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
1	Pertanian dan Perkebunan	Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan ( Irigasi Pertanian, Jalan Tani, dan Embung)	Desa Kahobo Tayawi	Pembuatan Irigasi Pertanian Terlaksana, tidak ada pembuatan jalan tani dan embung pada tahun 2016.	Cukup Baik	33%

(Sumber Dinas Pertanian 2016)

Tabel 21. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Perikanan Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2016

4.4.2 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perikanan Tahun 2016.

Pada tabel 4.18 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang perikanan pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.18 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perikanan khususnya program Infrastruktur Tahun 2016.

NO	Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
1	Perikanan	Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan	Kelurahan Goto	Pembuatan Pelabuhan Perikanan Terlaksana	Sedang Rata-rata	50%
		Ikan		di Kelurahan Goto tetapi tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan		

(Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan 2016)

Tabel 22. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Kelautan Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2016

4.4.3 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Kelautan Tahun 2016.

Pada tabel 4.19 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang kelautan pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.19 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bagian Perikanan Khususnya program Infrastruktur Tahun 2016.

NO	Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
1	Perikanan	Sarana dan Prasarana	Kelurahan Goto	Pembuatan Pelabuhan Perikanan Terlaksana	Sedang Rata-rata	50%
		Perikanan Tangkap (Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan		di Kelurahan Goto tetapi tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan. Dari data evaluasi pada tahun 2016, ada 7 Tempat yang harus di kelola tetapi hanya 6 yang di kelola oleh pemerintah		

(Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan 2016)

Tabel 23. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pariwisata Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2016

4.4.4 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pariwisata Tahun 2016.

Pada tabel 4.20 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang pariwisata pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.20 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pariwisata Khususnya program Infrastruktur Tahun 2016.

NO	Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
1	Perikanan	Sarana dan Prasarana Pariwisata ( WC, Kamar mandi, Tempat Parkir)	Kelurahan Akesdu	Pengelolaan destinasi wisata yang ada di kelurahan akesdu sudah tertata dengan baik tetapi tidak di lengkapi dengan sarana Parkir Mobil/ motor.	Sedang rata-rata	60%

(Sumber Dinas Pariwisata 2016)

Tabel 24. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2016

4.4.5 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2016.

Pada tabel 4.21 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang Perumahan dan Permukiman pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.21 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perumahan dan Permukiman khususnya program Infrastruktur Tahun 2016.

NO	Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
1	Infrastruktur	Drainase dan Sarana Prasarana Pasar	Kelurahan Ome, Kelurahan Indonesana Sarimataha, Gedung dan Hotel	Pembuatan drainase di kelurahan ome terlaksana, pembuatan sarana prasarana pasar	Sedang Rata-rata	64%
				terlaksana tetapi tidak pembangunan gedung atau hotel di tahun 2016.		
2	Infrastruktur	Jalan, dan Jembatan	Kelurahan, Lada ake, dan Kelurahan payaba	Presentase jalan yang di buat di tahu 2016 dengan target 78.50 tetapi pada tahun 2016 hanya mencapai 42,79 yang di mana hanya jalan Lada ake- Jaya	(Jalan) Cukup baik (jembatan) Baik	42,79% 89.11%



				yang dibuat, dan pembuatan jembatan dengan target 8 jembatan sudah rampung tetapi ada salah satu jembatan di Kelurahan payabe yang belum di perbaiki oleh pemerintah, di karenakan anggaran yang tidak mepenuhi.		
3	Infrastruktur	Pelabuhan, RTH Tugulufo	Kelurahan Rum dan Kelurahan Tomogoba	Pelabuhan rum yang atapunya ambruk sudah di benahi oleh pemerintah pada akhir tahun 2016, Karena sudah banyak pengeluaran dari beberapa pengguna pelabuhan, RTH Tugulufo	Sedang Rata-rata	50%
				yang tidak di benahi dan di salah gunakan oleh warga setempat sebagai kios jajan		

(sumber Dinas Bepitbang 2016)

**Tabel 25. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanian Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2017**

4.4.6 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pertanian Tahun 2017.

Pada tabel 4.22 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang pertanian pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.22 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pertanian khususnya program Infrastruktur Tahun 2017.

NO	Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
1	Pertanian dan Perkebunan	Sarana dan Prasaran Pertanian dan Perkebunan ( Irigasi Pertanian, Jalan Tani, dan Embung)	Desa Tayawi dan Desa Koli	Pembuatan Irigasi	Cukup Baik	33%
				Terlaksana, jalan tani di desa kabobo belum di perbaiki dan tidak ada pembuatan embung pada tahun 2017.		

(sumber dinas pertanian 2017)

**Tabel 26. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Perikanan Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2017**

4.4.7 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perikanan Tahun 2017.

Pada tabel 4.23 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang perikanan pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.23 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perikanan khususnya program Infrastruktur Tahun 2017.

NO	Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
1	Perikanan	Sarana dan Prasaran Perikanan Tangkap (Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan)	Kelurahan Payabe	Pembuatan Pelabuhan Perikanan Terlaksana di Kelurahan Goto tetapi tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan	Sedang Rata-rata	50%

(sumber Dinas Kelautan dan Perikanan 2017)

**Tabel 27. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Kelautan Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2017**

4.4.8 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Kelautan Tahun 2017.

Pada tabel 4.24 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang kelautan pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.24 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Kelautan khususnya program Infrastruktur Tahun 2017.

Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
Perikanan	Sarana dan Prasaran Budi daya ikan (Lemari Penyimpan dan Bagas ikan)	Kelurahan Payabe	Pembuatan Bagas Ikan terlaksana tetapi pengadaan Lemari penyimpanan ikan tidak terlihat di lapangan. Target sarana prasarana kelautan pada tahun 2017 adalah: 7 Tempat yang di kelola tetapi hanya mencapai 5 Tempat saja yang di kelola.	Sedang Rata-rata	50%

(sumber Dinas Kelautan dan Perikanan 2017)

**Tabel 28 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pariwisata Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2017**

4.4.9 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pariwisata Tahun 2017.

Pada tabel 4.25 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang pariwisata pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.25 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pariwisata khususnya program Infrastruktur Tahun 2017.

NO	Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
1	Pariwisata	Sarana dan Prasaran ( WC, Kamar mandi, Tempat Parkir)	Kelurahan Cobo	Pengelolaan destinasi wisata yang ada di Kelurahan Cobo belum tertata dengan baik karena tidak ada sarana prasarana WC dan kamar mandi di area wisata, tetapi destinasi wisata di Kelurahan cobo mempunyai lahan parkir Mobil dan Motor	Cukup baik	33%

(sumber Dinas Pariwisata 2017)

### Tabel 29. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2017

4.4.10 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2017.

Pada tabel 4.26 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang perumahan dan Permukiman pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.26 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perumahan dan Permukiman khususnya program Infrastruktur Tahun 2017.

NO	Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
1	Infrastruktur	Drainase dan Sarana Prasaran Pasar Sarimalaha, Gedung dan Hotel	Kelurahan Bobo dan Kelurahan Bobo Indonesia	Pembuatan drainase di kelurahan Bobo terlaksana, pembuatan sarana prasarana pasar terlaksana]	Sedang/ Rata-rata	66%
				tetapi tidak pembangunan gedung atau hotel di tahun 2017.		
2	Infrastruktur	Jalan dan Jembatan	Terminal Sofifi dan Kelurahan Mareku	Presentase jalan yang di buat di tahun 2017 dengan target 61,09 tetapi pada tahun 2017 hanya mencapai 59,97 yang di mana hanya jalan Terminal Sofifi yang dibuat, dan pembuatan jembatan dengan target 9 jembatan sudah rampung tetapi ada salah satu jembatan di kelurahan Mareku yang belum di perbaiki oleh pemerintah, di karenakan anggaran yang tidak mencukupi]	Sedang/ Rata-rata	50%
3	Infrastruktur	Pelabuhan dan RTH Tugulufa	Kelurahan Sofifi dan Kelurahan Tugaaji	Pelabuhan Sofifi yang tidak mempunyai ruang tunggu sudah mulai di buat pada bulan November 2017 untuk kenyamanan para penumpang . Karena sudah banyak keluhan dari beberapa pengguna pelabuhan.	Sedang/ Rata-rata	50%

				RTH Tugulufa yang di buat kios jajan oleh pemerintah setempat, presentase RTH tugalufa yang sebelumnya 80% sekarang hanya ada 60% yang 20% di ambil untuk di buat kios jajan.		
--	--	--	--	---	--	--

(Sumber Dinas Baupelitbang 2017)

### Tabel 30 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanian Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2018

4.4.11 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pertanian Tahun 2018.

Pada tabel 4.27 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang pertanian pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.27 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pertanian Khususnya program Infrastruktur Tahun 2018.

NO	Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
1	Pertanian dan Perkebunan	Sarana dan Prasaran Pertanian dan Perkebunan ( Irigasi Pertanian, Jalan Tani, dan Embung)	Desa Kosa dan Kelurahan Gurubunga	Pembuatan Irigasi Pertanian Terlaksana, Pembuatan Embung Terlaksana di Kelurahan Gurubunga, Tetapi tidak ada pembuatan jalan tani pada tahun 2018.	Sedang/ Rata-rata	66%

(Sumber Dinas Pertanian 2018)

### Tabel 31 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Perikanan Khususnya di Program Infrastruktur Tahun 2018

4.4.12 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perikanan Tahun 2018.

Pada tabel 4.28 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang perikanan pada program infrastruktur dengan parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.28 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perikanan Tahun 2018.

NO	Variabel	Sub - Variabel	Lokasi	Evaluasi/ Deskripsi	Parameter Keberhasilan	Presentase
1	Perikanan	Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan)	Kelurahan Tomolou	Pembuatan Pelabuhan Perikanan Terlaksana di Kelurahan Tomolou tetapi tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan	Sedang/ Rata-rata	50%

(Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan 2018)



Tabel 35. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 5 Bidang di Program Infrastruktur Tahun 2016-2018

Tabel 4.32 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 5 bidang khususnya program Infrastruktur Tahun 2016-2018.

NO	BIDANG-BIDANG YANG MENJALANKAN PROGRAM INFRASTRUKTUR	2016	2017	2018
1	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	33%	33%	66%
2	PERIKANAN	50%	50%	50%
3	KELAUTAN	50%	50%	50%
4	PARIWISATA	66%	33%	66%
5	BAPELITBANG	42%	50%	65%

(sumber: Dinas Bapelitbang 2018)

### KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat temuan lapangan yang dapat penulis simpulkan di 5 bidang Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pariwisata, dan Pekerjaan Umum khususnya di program Infrastruktur terdapat begitu banyak masalah yang terjadi, program yang di buat oleh Pemerintah belum efektif di lapangan sehingga program yang di buat belum sepenuhnya di jalankan di lapangan sehingga masi banyak masalah yang terjadi.
2. Berdasarkan hasil analisis Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 5 bidang Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pariwisata dan Pekerjaan Umum khususnya di program Infrastruktur dengan parameter sebagai berikut pada tahun 2016-2018 dari 5 bidang belum semua mencapai target (100%) di antaranya di bidang Petanian 2016, 33% 2017, 33%, 2018, 66%, di bidang perikanan 2016, 50%. 2017, 50%, 2018 50%, di bidang kelautan 2016, 50%, 2017, 50%, 2018, 50%, di bidang pariwisata 2016, 66%, 2017, 33%, 2018, 66%, di bidang pekerjaan umum 2016, 42%, 2017, 50%, 2018, 65%. yang dapat penulis simpulkan bahwa beberapa kebijakan yang di buat pemerintah sudah cukup baik karena presentase yang di targetkan Pemerintah dari tahun ke tahun belum mencapai target (100%) yang sudah di tentukan oleh Pemerintah sehingga ada saja program yang belum terlaksana di lapangan dengan baik.

### SARAN

1. Pemerintah harus berperan aktif di lapangan karena ada beberapa kebijakan tidak menapai target yang sudah di tentukan Pemerintah, terutama di bagian infrastruktur yang menjadi faktor penting untuk mendukung Kota Tidore Sebagai Kota Jasa Berbasis Agromarine, perlu adanya pembagian pengontrolan di setiap bidang yang di menjalankan kebijakan

tersebut, agar capaian target terpenuhi

2. Menuju Kota jasa Berbasis Agromarine membutuhkan waktu yang panjang sudah tiga tahun Kebijakan tersebut berjalan dan baru tahun ketiga kebijakan ini berjalan dengan baik, terlepas dari peran pemerintah peran masyarakat juga penting demi stabilnya implementasi kebijakan di lapangan, jadi pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dan mensosialisasikan program tersebut, demi menuju Kota Tidore Sebagai Kota Jasa Berbasis Agromarine

### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson dalam Sulistio (2012). *Evaluasi Kebijakan Publik*. [http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=457:evaluasi Kebijakan Publik-12:artikel&Itemid=85](http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=457:evaluasi%20Kebijakan%20Publik-12:artikel&Itemid=85)
- Arikunto., 2013. *Pengertian Evaluasi*. [http://www.stiebandung.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=467:pengertian evaluasi-14:artikel&Itemid=56](http://www.stiebandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=467:pengertian%20evaluasi-14:artikel&Itemid=56).
- Arikunto., 2013. *Pengertian Kebijakan*. [http://www.stiebandung.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=357:pengertiankebijakan=17:artikel&Itemid=76](http://www.stiebandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=357:pengertiankebijakan=17:artikel&Itemid=76)
- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tidore Kepulauan: Data RPJMD Kota Tidore Kepulauan
- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tidore Kepulauan: Data Rtrw Kota Tidore Kepulauan
- Dahuri, 1998 *Perumusan Model Pembangunan wilayah Kepulauan dengan pola Agromarine*.
- Hein 1990 *Pengertian Agromarine*. [http://www.UNDIPac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=357:pengertian agromarine-34:artikel&Itemid=96](http://www.UNDIPac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=357:pengertian%20agromarine-34:artikel&Itemid=96)
- Moloeng, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhadjir, N. (1989). *Metodologi Penelitian evaluatif*. Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Suharno. (2013). *Pendekatan Evaluasi Kebijakan*. [http://ugm.ac.id/id/berita/2051-ugm.pendekatan evaluasi kebijakan](http://ugm.ac.id/id/berita/2051-ugm.pendekatan%20evaluasi%20kebijakan).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
- Winarno 2014 *Pengertian Evaluasi Kebijakan* [http://ugm.ac.id/id/berita/2071-ugm.pengertian evaluasi kebijakan](http://ugm.ac.id/id/berita/2071-ugm.pengertian%20evaluasi%20kebijakan)
- Werf. *Pengertian Evaluasi Kebijakan Pemerintah* [www.thepresidency.gov.za/learning/reference/framework/part3.pdf](http://www.thepresidency.gov.za/learning/reference/framework/part3.pdf)